

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Halim. 2018. *Hukum Transaksi Elektronik. Sebagai Panduan Dalam Mengahdapi Era Digital Bisnis E-commerce Di Indonesia*. Bandung : Hikam Media Utama
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Ed. 2). Sinar Grafika
- Khairandy, R. (2017). *Hukum kontrak Indonesia, dalam perspektif perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahmud Marzuki, Peter 2005. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. PT Rineka Cipta
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, A. (2020). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sidabalok, J. (2019). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soerjono, Soekanto (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Suharto, E. (2018). *Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM*. Bandung: Alfabeta

Sunarsi, D. (2020). Implikasi Digitalisasi UMKM. In *Digitalisasi Umkm*

Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2013). *Hukum transaksi elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ubrahim, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum normatif: Analisis preskriptif dan terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel dalam Jurnal

Abdullah, T., & Wardana, L. W. (2020). *The role of digital platforms in empowering SMEs in Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 901–909.

<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.901>

Ainiyah, Z. (2025). Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2091–2095. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.810>

Ardhya, Si Ngurah. I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliartini. (2021). Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, e-

Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha: 4. (2).

670

As'hal, A. 'Azhim Al, & Kurniawan, E. H. (2024). Membangun *Brand Equity* UMKM Ikan Asap Menggunakan Teknologi *Augmented Reality* melalui Literasi Pemasaran. *Jurnal Andromeda*, 2(1), 127–140.

Chia, J. Y. (2018). *Fair trading regulation and small business participation in Singapore*. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2018(1), 98–116

Darmayanti, E., Ginting, E., & Elektronik, K. (2025). *Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Kekuatan* 19(19), 1337–1346.

Matteo, L. A. (2014). *International Contracting: Law and Practice (2nd ed.)*. *Kluwer Law International*.

Farida, E., Rahma, S. El, Hukum, F., Pamulang, U., Manajemen, F., & Pamulang, U. (2025). *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6.

Firmansyah, I., & Anwar, M. (2019). Perkembangan fintech dan pengaruhnya terhadap sistem pembayaran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 153–168

Hafidz, R. (2021). Penyelesaian sengketa transaksi elektronik: Prosedur litigasi dan tradisi ADR di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 65–82.

Hamzah, M., Yasin, A., Azis, M., Khairuddin, I., & Anam, S. (2025). Digitalisasi Ekonomi : Peranan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Menawan : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*.

- Hidayah, N. (2019). *Regulatory sandbox* dalam pengaturan inovasi keuangan digital di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*
- Hidayat, A., & Prananingtyas, P. (2021). Pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik dalam perspektif hukum perdagangan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 190–205
- Kabupaten, U., Meningkatkan, K., Hukum, L., Ikhsan, M., Nuragung, M. H., Makul, T., & Roy, R. (2025). Pendidikan Hukum Kontrak Elektronik untuk UMKM Desa Baharu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 299–314.
- Khoiriyah, S., & Pratama, G. (2025). *Peran Strategi Pengembangan Bisnis dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Deskriptif Kualitatif*. 2962–763.
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2020). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>
- Kurniasih, D. (2022). Kontrak elektronik baku dan posisi tawar UMKM dalam *e-commerce*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 327–345
- Kurniawan, M. B. (2019). Perlindungan hukum dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam era ekonomi digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 34(2), 55–72
- Kurniawan, A. (2024). Pengaturan *social commerce* dan perdagangan impor dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Bisnis dan Regulasi Digital*

- Lestari, D. (2021). Pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(2), 145–162
- Maulida, R. (2024). Implementasi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1)
- Menon, S. (2018). Justice in the digital economy. *Singapore Academy of Law Journal*, 30(1), 1–18
- Miantari, N. K. D., Windari, R. A., & Yuliartini, N. P. R. (2018). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(2), 11.
- Moha, M. R., Ahmad, A., Harun, A. A., & Elfikri, N. F. (2023). The Comparative Law Study: *E-Commerce* Regulation in Indonesia and Singapore. *Jurnal Legalitas*, 16(2), 248–259. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.20463>
- Nasution, A. M., Putra, R. F., & Sinaga, B. (2021). Online Dispute Resolution (ODR) dalam sengketa transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(2), 85–102.
- Nugroho, Y., & Syarifuddin, M. (2021). Legal protection in electronic transactions in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 350–366
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 93–103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257>

- Phang, A. (2020). Competition law as an instrument of SME protection in Singapore. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(2), 265–284.
<https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.14>
- Prasetyo, T. (2020). Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam perspektif PP No. 71 Tahun 2019. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 789–805
- Prasetyo, T., & Ramli, T. S. (2021). Reformasi regulasi UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 613–631
- Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617-625.
- Pratama, R., & Santoso, B. (2021). Validitas perjanjian elektronik dalam transaksi e-commerce berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 456–472
- Purcahyono, D. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital*. 5(4), 21.
- Putra, D. A. (2023). Kedudukan hukum pelaku usaha dalam ekosistem marketplace berdasarkan regulasi PMSE. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2)
- Putri, N. A. (2023). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1), 75–90
- Putri, M. D., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap

pelaku usaha penjahit pakaian atas itikad tidak baik konsumen yang menimbulkan kerugian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Locus Delicti*, 6(1), 39–50. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Raaken Danendra A W, Silvana Purbawanti, & Zella Fathona Aska. (2025). Peran E-Commerce dalam Meningkatkan Peluang bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 103–109. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.794>

Rachmadi, T. (2021). Kontrak elektronik dalam perdagangan digital dan perlindungan pelaku usaha kecil. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(2), 155–170

Rahayu, S. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 233–248

Rahdiana, N., Meliana, D., Sukarman, Oktaviani, T., NurSuhaeni, S., Hildawati, L., Shintia, & Alfinda, R. D. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Buana Pengabdian*, 4(1), 10–21.

Ramadhani, P. R. (2023). Tanggung jawab *marketplace* dalam perdagangan melalui sistem elektronik pasca Permendag No. 31 Tahun 2023. *Jurnal Yuridika*

Rokan, M. K. (2018). Hukum persaingan usaha dalam perdagangan elektronik di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 365–380

- Sahida, G. A., Bintang, A. K., & Hayati, A. M. (2025). Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy: Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/vds9z434>
- Santoso, B. (2020). Aspek hukum perdagangan melalui sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Jurnal Yuridika*, 35(2), 213–228
- Saragih, B. R. (2018). Perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM dalam sistem hukum nasional. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 421–438.
- Sari, R. K. (2019). Perdagangan melalui sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 512–530
- Saputri, O. B. (2021). Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 17(3), 482–494. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Schwenzer, I., & Hachem, P. (2016). *The CISG Successes and Pitfalls*. *American Journal of Comparative Law*, 64(1), 103–126.
- Siregar, M. F. (2020). Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 389–404
- Siregar, D. (2022). Arbitrase dan mediasi dalam transaksi elektronik: Implementasi ADR di era digital. *Jurnal Arbitrase dan ADR*, 5(3), 130–147.

- Situmorang, M. (2020). Ketimpangan struktural UMKM dalam ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 63–78
- Singapore Statutes Online. (2010). *Electronic Transactions Act 2010 (Cap. 88)*. Singapore: Government of Singapore
- Susanti, D. O. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 85–104.
- Sutrisno, E. (2022). Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Tan, J. M. (2018). *Arbitration and mediation for cross-border e-commerce disputes in Singapore*. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(1), 52–71.
<https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.4>
- Tan, J. M. (2018). Arbitration and mediation for cross-border e-commerce disputes in Singapore. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(1), 52–71.
- Tan, E. (2020). *Enterprise Singapore Act and SME empowerment in the digital economy*. *Singapore Law Review*, 38(2), 101–120
- Utama, P. B., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2026). *Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli akun Mobile Legends online menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 759–771.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.7951>
- Wibisana, A. G. (2021). Penyederhanaan perizinan usaha dalam perspektif hukum administrasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Wibowo, A. (2020). *Online dispute resolution sebagai alternatif penyelesaian*

sengketa e-commerce di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 391–406

Wibowo. Anggraini, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengguna platform digital dalam penyelenggaraan sistem elektronik. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 401–417

Yudiawan, I. D. G. H., Ardhya, S. N., Ariestu, I. P. D., Setianto, M. J., Yasmiati, N. L. W., & Anugrah, D. A. (2025). *Justice for tourist transportation business services against foreign tourists who drive without a driver's license. SHS Web of Conferences*, 221, Article 03016. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103016>

Karya Tulis Ilmiah

Andini, R. P. (2021). *Perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perjanjian kemitraan* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Lestari, N. K. A. (2022). *Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam transaksi e-commerce* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Rachmat, S. P., Alhady, I., Redra, I. D., Ruslina, E., Pasundan, U., & Digital, E. (n.d.). Transformasi Hukum Sebagai Pondasi Ekonomi Digital Implementasi. 8(1), 1–9.

Saputra, I. M. H. V. A. (2022). *Akibat hukum terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang melakukan jual beli barang palsu menggunakan merek terkenal di wilayah Kabupaten Buleleng*

Sinaga. (2025). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen*

Medan. (Skripsi)

Artikel Website

OECD. (2019). *SME policy and competition in Southeast Asia*. OECD Publishing.

<https://doi.org/10.1787/9789264314766-en>

World Bank. (2020). *Enhancing SME access to markets and dispute resolution in Singapore*. World Bank Publications.

UNCITRAL. (2017). *Technical notes on online dispute resolution*. United Nations
Singapore State Courts. (n.d.). *Community Justice and Tribunals System (CJTS)*

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang – Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)

Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

PP No 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222*)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara*

Republik Indonesia Nomor 6619

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2023)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. (2024). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912*

Electronic Transactions Act 2010 (The Statutes Of The Republic Of Singapore) United Nations. (1980). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* Singapore. (2018). *Enterprise Singapore Act 2018. Statutes of Singapore* Singapore. (2001). *Arbitration Act. Statutes of Singapore* Singapore. (2017). *Mediation Act 2017. Statutes of Singapore* *Small Claims Tribunals Act (Cap. 308). (1985). Revised Edition 2014. Singapore: Government of Singapore*

Singapore. (2003). Consumer Protection (Fair Trading) Act (Cap. 52A). Statutes of the Republic of Singapore.

Singapore. (1970). State Courts Act (Cap. 321). Statutes of the Republic of Singapore.

